

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
PADA SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi ditingkat petani sesuai jumlah, jenis, waktu, tempat dengan mutu terjamin dan harga berdasarkan harga eceran tertinggi, perlu menetapkan pengalokasian pupuk bersubsidi pada sektor pertanian Tahun Anggaran 2014 bagi Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan OT./140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesifikasi Lokasi;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Dipasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.
5. Dinas Pertanian dan Peternakan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.
6. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.
7. Pupuk adalah bahan kimia atau organism yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
8. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
9. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
11. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.

12. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per-Provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Provinsi.
13. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
14. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan Menteri Pertanian.
15. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
16. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luas tertentu.
17. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luas tertentu.
18. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luas tertentu.
19. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luas tertentu.
20. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik dan pupuk organik di dalam negeri.
21. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
22. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
23. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur.

BAB II

PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN

Bagian Kesatu

Peruntukan

Pasal 2

- (1) Jenis pupuk bersubsidi sebagai berikut :
 - a. pupuk an-organik;
 - b. pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi :
 - a. petani;
 - b. pekebun;
 - c. peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar;
 - d. petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim.
- (3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan bagi :
 - a. perusahaan tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan;
 - d. peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Bagian Kedua

Pengalokasian Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran berimbang spesifik lokasi/disesuaikan dengan alokasi pupuk bersubsidi.

- (2) Pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut :
- Kabupaten/Kota;
 - jenis;
 - jumlah;
 - subsektor;
 - sebaran bulanan.
- (3) Rincian alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai mana berikut :
- sasaran tanaman padi di Provinsi Banten menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi menurut subsektor di Provinsi Banten tahun 2014;
 - alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi menurut jenis perkabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2014;
 - rekapitulasi alokasi kebutuhan jenis pupuk urea bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - alokasi kebutuhan jenis pupuk urea bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - alokasi kebutuhan jenis pupuk urea bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - alokasi kebutuhan jenis pupuk urea bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - alokasi kebutuhan jenis pupuk urea bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - alokasi kebutuhan jenis pupuk urea bersubsidi subsektor perikanan budidaya menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - rekapitulasi alokasi kebutuhan jenis pupuk SP-36 bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - alokasi kebutuhan jenis pupuk SP-36 bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - alokasi kebutuhan jenis pupuk SP-36 bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - alokasi kebutuhan jenis pupuk SP-36 bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan tahun 2014;

- n. alokasi kebutuhan jenis pupuk SP-36 bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan tahun 2014;
- o. alokasi kebutuhan jenis pupuk SP-36 bersubsidi subsektor perikanan budidaya menurut sebaran bulan tahun 2014;
- p. rekapitulasi alokasi kebutuhan jenis pupuk ZA bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan tahun 2014;
- q. alokasi kebutuhan jenis pupuk ZA bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan tahun 2014;
- r. alokasi kebutuhan jenis pupuk ZA bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan tahun 2014;
- s. alokasi kebutuhan jenis pupuk ZA bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan tahun 2014;
- t. alokasi kebutuhan jenis pupuk ZA bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan tahun 2014;
- u. rekapitulasi alokasi kebutuhan jenis pupuk NPK bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan tahun 2014;
- v. alokasi kebutuhan jenis pupuk NPK bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan tahun 2014,
- w. alokasi kebutuhan jenis pupuk NPK bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan tahun 2014;
- x. alokasi kebutuhan jenis pupuk NPK bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan tahun 2014;
- y. alokasi kebutuhan jenis pupuk NPK bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan tahun 2014;
- z. rekapitulasi alokasi kebutuhan jenis pupuk orgaik bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan tahun 2014;
- aa. alokasi kebutuhan jenis pupuk organik bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan tahun 2014;
- ab. alokasi kebutuhan pupuk organik bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan tahun 2014;
- ac. alokasi kebutuhan jenis pupuk organik bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan tahun 2014;
- ad. alokasi kebutuhan jenis pupuk organik bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan tahun 2014.

- (4) Rincian pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui realokasi antara wilayah, waktu dan subsektor.
- (2) Apabila pupuk bersubsidi pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi dari sisa alokasi bulanan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setelah ada rekomendasi Kepala Dinas.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur di Lini IV dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi dimasing-masing wilayah;
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Dinas melakukan pendataan RDKK.

- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk subsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

Pasal 6

- (1) Produsen, penyalur di lini I.
- (2) Lini II dan penyalur di Lini IV, menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan :
 - a. petani;
 - b. pekebun;
 - c. peternak;
 - d. petambak.
- (3) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi.

Pasal 7

- (1) Penyaluran di Lini IV dalam penjualan pupuk bersubsidi disesuaikan dengan HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pupuk urea = Rp. 1.800; Per Kg;
 - b. pupuk SP-36 = Rp. 2.000; Per Kg;
 - c. pupuk ZA = Rp. 1.400; Per Kg;
 - d. pupuk NPK = Rp. 2.300; Per Kg;
 - e. pupuk organik = Rp. 500; Per Kg.
- (3) HET Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk pembelian oleh:
 - a. petani;
 - b. pekebun;
 - c. peternak;
 - d. petambak di Lini IV.
- (4) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara tunai dalam kemasan pupuk sebagai berikut :
 - a. pupuk urea = 50 Kilogram;
 - b. pupuk SP-36 = 50 Kilogram;
 - c. pupuk ZA = 50 Kilogram;
 - d. pupuk NPK = 20 atau 50 Kilogram;
 - e. pupuk organik = 20 atau 40 Kilogram.

- (5) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus dengan bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

BAB IV

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan, melaksanakan pembinaan, kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.
- (2) Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV.
- (3) KPPP Provinsi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (2) KPPP Provinsi menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bahan laporan Gubernur kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi pada tingkat Kabupaten/Kota dirinci menurut :
 - a. Kecamatan;
 - b. jenis;
 - c. jumlah;
 - d. subsektor; dan
 - e. sebaran bulanan.

- (2) Rincian pengalokasian kebutuhan pada tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 13 Januari 2014

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 13 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. S A M S I R, SH. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 7 TAHUN 2014
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR
 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

PENGALOKASIAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

A. SASARAN TANAMAN PADI DI PROVINSI BANTEN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah (Ha)	RENCANA TANAM (Ha)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	138,334	6,339	13,126	16,498	28,442	12,493	2,675	1,394	817	1,775	10,496	18,860	25,419
2	LEBAK	96,294	6,655	1,735	2,211	11,601	14,082	6,098	849	121	885	2,697	26,042	23,318
3	TANGERANG	76,282	3,855	2,680	9,187	12,883	6,299	4,594	2,297	3,062	3,767	3,674	12,284	11,700
4	SERANG	85,609	16,900	8,341	4,002	8,902	13,210	11,331	2,688	602	1,527	2,323	5,318	10,465
5	KT.SERANG	13,182	1,887	1,222	591	138	1,785	2,133	347	499	3,371	77	183	949
6	KT.TANGERANG	1,206	156	-	-	-	-	40	91	123	175	183	223	215
7	KT.CILEGON	2,343	1,116	147	29	117	145	100	-	-	15	27	201	446
8	KT.TANGSEL	459	52	84	37	39	41	34	-	-	12	54	52	54
Jumlah		413,709	36,960	27,335	32,555	62,122	48,055	27,005	7,666	5,224	11,527	19,531	63,163	72,566

B. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT SUBSEKTOR DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2014

(Ton)						
No.	SUBSEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	TANAMAN PANGAN	35,575	13,838	643	18,254	3,725
2	HORTIKULTURA	2,807	1,114	50	2,761	449
3	PERKEBUNAN RAKYAT	7,471	3,627	281	5,216	687
4	PETERNAKAN	1,472	557	26	569	139
5	PERIKANAN BUDIDAYA	1,675	1,064		-	-
	TOTAL	49,000	20,200	1,000	26,800	5,000

C. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT JENIS PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2014

(Ton)

No.	Kabupaten/Kota	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	PANDEGLANG	16,297	6,736	332	8,863	1,665
2	LEBAK	11,404	4,687	237	6,232	1,161
3	TANGERANG	9,181	3,769	187	5,023	936
4	SERANG	10,085	4,180	209	5,548	1,037
5	KT.SERANG	1,560	646	30	870	165
6	KT.TANGERANG	145	54	-	76	11
7	KT.CILEGON	278	112	5	160	24
8	KT.TANGSEL	50	16	-	28	1
	TOTAL	49,000	20,200	1,000	26,800	5,000

D. REKAPITULASI ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN /BULAN(TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	16,297	751	1,516	1,928	3,369	1,456	317	165	97	210	1,244	2,234	3,010
2	LEBAK	11,404	788	205	262	1,375	1,668	722	100	13	105	320	3,085	2,761
3	TANGERANG	9,181	458	317	1,088	1,521	747	544	272	362	446	435	1,606	1,385
4	SERANG	10,085	1,948	989	473	1,055	1,565	1,342	319	71	180	275	629	1,239
5	KT.SERANG	1,560	224	144	70	16	211	253	40	59	400	9	22	112
5	KT.TANGERANG	145	19	1	1	-	-	4	11	14	21	22	27	25
6	KT.CILEGON	278	133	19	3	13	18	12	-	-	1	2	24	53
7	KT. TANGSEL	50	5	10	4	4	5	4	-	-	1	6	5	6
Jumlah		49,000	4,326	3,201	3,829	7,353	5,670	3,198	907	616	1,364	2,313	7,632	8,591

E. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	11,845	545	1,120	1,400	2,446	1,050	230	120	70	153	903	1,622	2,186
2	LEBAK	8,280	572	149	190	998	1,211	524	73	10	76	232	2,240	2,005
3	TANGERANG	6,666	332	230	790	1,104	542	395	198	263	324	316	1,166	1,006
4	SERANG	7,307	1,400	717	344	766	1,136	974	231	52	131	200	456	900
5	KT.SERANG	1,135	162	105	51	12	154	183	30	43	290	7	16	82
5	KT.TANGERANG	103	13	-	-	-	-	3	8	11	15	16	19	18
6	KT.CILEGON	200	96	13	2	10	12	9	-	-	1	2	17	38
7	KT.TANGSEL	39	4	7	3	3	4	3	-	-	1	5	4	5
Jumlah		35,575	3,124	2,341	2,780	5,339	4,109	2,321	660	449	991	1,681	5,540	6,240

F. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK UREA BERSUBSIDI SUBSEKTOR HORTIKULTURA MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	933	43	84	112	193	85	18	9	6	12	71	128	172
2	LEBAK	654	45	12	15	79	96	41	6	1	6	18	177	158
3	TANGERANG	526	26	18	62	87	43	31	16	21	26	25	92	79
4	SERANG	581	115	57	27	60	90	77	18	4	10	16	36	71
5	KT.SERANG	88	13	8	4	1	12	14	2	3	23	1	1	6
6	KT.TANGERANG	8	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1
7	KT.CILEGON	16	8	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	3
8	KT.TANGSEL	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2,807	251	181	220	421	327	182	52	36	78	132	437	490

G. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK UREA BERSUBSIDI SUBSEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	2,474	114	220	290	514	226	48	25	15	32	190	341	459
2	LEBAK	1,738	120	31	40	210	254	110	15	2	16	49	470	421
3	TANGERANG	1,399	70	48	166	232	114	83	41	55	68	66	245	211
4	SERANG	1,548	305	151	72	161	239	205	49	11	28	42	96	189
5	KT.SERANG	237	34	22	11	2	32	39	6	9	61	1	3	17
6	KT.TANGERANG	22	3	-	-	-	-	1	2	2	3	3	4	4
7	KT.CILEGON	43	20	3	1	2	3	2	-	-	-	-	4	8
8	KT.TANGSEL	10	1	2	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Jumlah		7,471	666	475	580	1,121	868	488	138	94	208	351	1,163	1,309

H. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK UREA BERSUBSIDI SUBSEKTOR PETERNAKAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	488	23	42	59	101	44	10	5	3	6	37	67	90
2	LEBAK	343	24	6	8	41	50	22	3	0	3	10	93	83
3	TANGERANG	276	14	10	33	46	22	16	8	11	13	13	48	42
4	SERANG	305	60	30	14	32	47	40	10	2	5	8	19	37
5	KT.SERANG	47	7	4	2	0	6	8	1	2	12	0	1	3
6	KT.TANGERANG	5	1	-	-	-	-	0	0	0	1	1	1	1
7	KT.CILEGON	8	4	1	0	0	1	0	-	-	0	0	1	2
8	KT.TANGSEL	1	-	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0
Jumlah		1,472	133	92	116	221	171	96	27	19	41	69	229	258

I. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK UREA BERSUBSIDI SUBSEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	558	26	50	67	115	51	11	6	3	7	43	76	103
2	LEBAK	389	27	7	9	47	57	25	3	-	4	11	105	94
3	TANGERANG	314	16	11	37	52	26	19	9	12	15	15	55	47
4	SERANG	345	68	34	16	36	53	46	11	2	6	9	22	42
5	KT.SERANG	54	8	5	2	1	7	9	1	2	14	-	1	4
5	KT.TANGERANG	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
6	KT.CILEGON	10	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1,675	151	108	131	251	195	110	30	19	47	79	261	293

J. REKAPITULASI ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK SP- 36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN / BULAN(TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	6,736	292	643	805	1,388	611	130	69	39	87	512	920	1,240
2	LEBAK	4,687	315	84	108	567	687	297	40	5	43	132	1,271	1,138
3	TANGERANG	3,769	172	131	449	627	307	224	112	149	184	179	663	572
4	SERANG	4,180	825	406	195	435	646	553	132	30	74	113	260	511
5	KT.SERANG	646	93	60	30	6	88	104	17	24	166	4	8	46
5	KT.TANGERANG	54	6	-	-	-	-	1	4	5	8	8	11	11
6	KT.CILEGON	112	55	6	1	5	6	4	-	-	1	1	11	22
7	KT.TANGSEL	16	2	4	1	1	1	1	-	-	-	2	2	2
Jumlah		20,200	1,760	1,334	1,589	3,029	2,346	1,314	374	252	563	951	3,146	3,542

K. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	4,614	200	439	552	951	418	89	47	27	59	351	631	850
2	LEBAK	3,208	210	58	74	388	471	204	28	4	30	90	871	780
3	TANGERANG	2,576	112	90	307	429	211	154	77	102	126	123	454	391
4	SERANG	2,864	565	279	134	298	442	379	90	20	51	78	178	350
5	KT.SERANG	443	63	41	20	5	60	71	12	17	113	3	6	32
5	KT.TANGERANG	39	5	-	-	-	-	1	3	4	6	6	7	7
6	KT.CILEGON	79	37	5	1	4	5	3	-	-	1	1	7	15
7	KT. TANGSEL	15	2	3	1	1	1	1	-	-	-	2	2	2
Jumlah		13,838	1,194	915	1,089	2,076	1,608	902	257	174	386	654	2,156	2,427

L. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUBSEKTOR HORTIKULTURA MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	374	17	37	44	77	34	7	4	2	5	28	51	68
2	LEBAK	258	18	5	6	31	38	16	2	-	2	7	70	63
3	TANGERANG	209	10	7	25	35	17	12	6	8	10	10	37	32
4	SERANG	231	46	22	11	24	36	31	7	2	4	6	14	28
5	KT.SERANG	35	5	3	2	-	5	6	1	1	9	-	-	3
6	KT.TANGERANG	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
7	KT.CILEGON	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
8	KT.TANGSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1,114	99	74	88	167	130	72	20	13	30	51	174	196

M. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUBSEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	1,206	49	115	145	249	110	23	12	7	16	92	165	223
2	LEBAK	842	58	15	19	102	123	53	7	1	8	24	228	204
3	TANGERANG	680	34	23	81	113	55	40	20	27	33	32	119	103
4	SERANG	750	148	73	35	78	116	99	24	5	13	20	47	92
5	KT.SERANG	117	17	11	5	1	16	19	3	4	30	1	2	8
6	KT.TANGERANG	11	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2
7	KT.CILEGON	20	10	1	-	1	1	1	-	-	-	-	2	4
8	KT.TANGSEL	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3,627	317	238	285	544	421	235	67	45	102	171	565	636

N. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUBSEKTOR PETERNAKAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	186	9	18	22	38	17	4	2	1	2	14	25	34
2	LEBAK	132	12	2	3	16	19	8	1	-	1	4	35	31
3	TANGERANG	103	5	4	12	17	8	6	3	4	5	5	18	16
4	SERANG	115	23	11	5	12	18	15	4	1	2	3	7	14
5	KT.SERANG	18	3	2	1	-	2	3	-	1	5	-	-	1
6	KT.TANGERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KT.CILEGON	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	KT.TANGSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		557	54	37	43	83	64	36	10	7	15	26	85	97

O. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUBSEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	356	17	34	42	73	32	7	4	2	5	27	48	65
2	LEBAK	247	17	4	6	30	36	16	2	-	2	7	67	60
3	TANGERANG	201	11	7	24	33	16	12	6	8	10	9	35	30
4	SERANG	220	43	21	10	23	34	29	7	2	4	6	14	27
5	KT.SERANG	33	5	3	2	-	5	5	1	1	9	-	-	2
6	KT.TANGERANG	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
7	KT.CILEGON	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
8	KT.TANGSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1,064	96	69	84	159	123	69	20	13	30	49	166	186

P. REKAPITULASI ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN /BULAN(TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	332	16	31	40	68	30	6	3	3	4	25	45	61
2	LEBAK	237	16	4	5	28	35	14	3	-	2	7	68	55
3	TANGERANG	187	9	6	22	32	15	11	6	7	10	8	33	28
4	SERANG	209	40	21	9	22	33	28	6	1	4	6	14	25
5	KT.SERANG	30	6	3	1	-	4	5	1	1	7	-	-	2
6	KT.TANGERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KT.CILEGON	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	KT.TANGSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1,000	91	65	77	150	117	64	19	12	27	46	160	172

Q. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK ZA BERSUBSIDI SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	213	10	19	26	44	19	4	2	1	3	16	29	40
2	LEBAK	153	10	3	3	18	22	9	1	-	1	4	46	36
3	TANGERANG	121	6	4	14	20	10	7	4	5	6	6	21	18
4	SERANG	133	26	13	6	14	21	18	4	1	2	4	8	16
5	KT.SERANG	20	3	2	1	-	3	3	1	1	5	-	-	1
6	KT.TANGERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KT.CILEGON	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	KT. TANGSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		643	57	41	50	96	75	41	12	8	17	30	104	112

R. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK ZA BERSUBSIDI SUBSEKTOR HORTIKULTURA MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	17	1	2	2	3	2	-	-	1	-	1	2	3
2	LEBAK	13	1	-	-	1	2	1	1	-	-	1	3	3
3	TANGERANG	9	-	-	1	2	1	1	-	-	1	-	2	1
4	SERANG	9	2	1	-	1	2	1	-	-	-	-	1	1
5	KT.SERANG	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KT.TANGERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KT.CILEGON	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KT.TANGSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		50	6	3	3	7	7	3	1	1	1	2	8	8

S. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK ZA BERSUBSIDI SUBSEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	93	4	9	11	19	8	2	1	1	1	7	13	17
2	LEBAK	67	5	1	2	8	10	4	1	-	1	2	18	15
3	TANGERANG	53	3	2	6	9	4	3	2	2	3	2	9	8
4	SERANG	59	11	6	3	6	9	8	2	-	1	2	4	7
5	KT.SERANG	8	2	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1
6	KT.TANGERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KT.CILEGON	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KT.TANGSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		281	26	19	22	42	32	18	6	3	8	13	44	48

T. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK ZA BERSUBSIDI SUBSEKTOR PETERNAKAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	9	1	1	1	2	1	-	-	-	-	1	1	1
2	LEBAK	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
3	TANGERANG	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
4	SERANG	8	1	1	-	1	1	1	-	-	1	-	1	1
5	KT.SERANG	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6	KT.TANGERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KT.CILEGON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KT.TANGSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		26	2	2	2	5	3	2	-	-	1	1	4	4

U. REKAPITULASI ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN /BULAN(TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	8,863	411	851	1,069	1,743	809	174	91	52	114	679	1,222	1,648
2	LEBAK	6,232	429	113	144	751	912	395	55	8	57	175	1,682	1,511
3	TANGERANG	5,023	250	174	595	832	408	298	148	198	244	238	880	758
4	SERANG	5,548	1,096	540	259	576	856	735	175	40	98	151	344	678
5	KT.SERANG	870	140	79	38	9	116	138	21	32	220	5	11	61
5	KT.TANGERANG	76	10	-	-	-	-	3	6	8	11	11	14	13
6	KT.CILEGON	160	83	9	1	7	9	6	-	-	1	1	13	30
7	KT.TANGSEL	28	3	6	2	2	3	2	-	-	1	3	3	3
Jumlah		26,800	2,422	1,772	2,108	3,920	3,113	1,751	496	338	746	1,263	4,169	4,702

V. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK NPK BERSUBSIDI SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	6,089	265	579	728	1,255	551	118	62	36	78	463	832	1,122
2	LEBAK	4,235	280	77	98	512	621	269	37	5	39	119	1,149	1,029
3	TANGERANG	3,409	160	118	405	566	278	203	101	135	166	162	599	516
4	SERANG	3,764	730	368	177	393	583	500	119	27	67	103	235	462
5	KT.SERANG	581	83	54	26	6	79	94	15	22	149	3	8	42
5	KT.TANGERANG	53	7	-	-	-	-	2	4	5	8	8	10	9
6	KT.CILEGON	102	49	6	1	5	6	4	-	-	1	1	9	20
7	KT. TANGSEL	21	2	4	2	2	2	2	-	-	1	2	2	2
Jumlah		18,254	1,576	1,206	1,437	2,739	2,120	1,192	338	230	509	861	2,844	3,202

W. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK UREA BERSUBSIDI SUBSEKTOR HORTIKULTURA MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	921	40	88	110	190	83	18	9	5	12	70	126	170
2	LEBAK	639	39	12	15	77	94	41	6	1	6	18	174	156
3	TANGERANG	518	26	18	61	86	42	31	15	20	25	25	91	78
4	SERANG	572	113	56	27	59	88	76	18	4	10	16	35	70
5	KT.SERANG	88	13	8	4	1	12	14	2	3	23	1	1	6
6	KT.TANGERANG	7	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
7	KT.CILEGON	15	7	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	3
8	KT.TANGSEL	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2,761	239	184	217	414	320	181	51	34	77	131	429	484

X. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK NPK BERSUBSIDI SUBSEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	1,661	95	166	208	259	158	34	18	10	22	132	238	321
2	LEBAK	1,226	100	22	28	146	178	77	11	2	11	34	323	294
3	TANGERANG	989	59	34	116	162	79	58	29	39	48	46	171	148
4	SERANG	1,096	230	105	50	112	167	143	34	8	19	29	67	132
5	KT.SERANG	182	40	15	7	2	23	27	4	6	43	1	2	12
6	KT.TANGERANG	16	2	-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	3
7	KT.CILEGON	40	25	2	-	1	2	1	-	-	-	-	3	6
8	KT. TANGSEL	6	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1
Jumlah		5,216	551	344	409	682	607	341	97	67	145	244	807	916

Y. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK NPK BERSUBSIDI SUBSEKTOR PETERNAKAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	192	11	18	23	39	17	4	2	1	2	14	26	35
2	LEBAK	132	10	2	3	16	19	8	1	-	1	4	36	32
3	TANGERANG	107	5	4	13	18	9	6	3	4	5	5	19	16
4	SERANG	116	23	11	5	12	18	16	4	1	2	3	7	14
5	KT.SERANG	19	4	2	1	-	2	3	-	1	5	-	-	1
6	KT.TANGERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KT.CILEGON	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	KT.TANGSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		569	55	37	45	85	65	37	10	7	15	26	88	99

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	LEBAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TANGERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KT.SERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KT.TANGERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KT.CILEGON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Z. REKAPITULASI ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN /BULAN(TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	1,665	70	157	200	344	152	32	17	9	22	127	227	308
2	LEBAK	1,161	78	22	27	140	170	74	10	1	10	32	315	282
3	TANGERANG	936	46	32	111	155	76	56	28	37	45	44	165	141
4	SERANG	1,037	205	101	48	108	159	137	32	7	20	29	65	126
5	KT.SERANG	165	23	14	7	1	22	26	4	6	47	1	2	12
5	KT.TANGERANG	11	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2
6	KT.CILEGON	24	13	1	-	1	1	1	-	-	-	-	2	5
7	KT.TANGSEL	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		5,000	436	328	393	749	580	326	92	61	146	235	778	876

AA. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK UREA BERSUBSIDI SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	1,237	47	118	149	256	113	24	13	7	16	95	170	229
2	LEBAK	863	55	16	20	104	127	55	8	1	8	24	235	210
3	TANGERANG	699	35	24	83	116	57	41	21	28	34	33	122	105
4	SERANG	770	152	75	36	80	119	102	24	5	14	21	48	94
5	KT.SERANG	124	17	11	5	1	16	19	3	4	36	1	2	9
5	KT.TANGERANG	11	1	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2
6	KT.CILEGON	20	10	1	-	1	1	1	-	-	-	-	2	4
7	KT. TANGSEL	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3,725	317	246	293	558	433	242	70	46	110	176	581	653

AB. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUBSEKTOR HORTIKULTURA MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	151	7	14	18	31	14	3	2	1	2	11	20	28
2	LEBAK	105	8	2	2	13	15	7	1	-	1	3	28	25
3	TANGERANG	84	4	3	10	14	7	5	2	3	4	4	15	13
4	SERANG	94	19	9	4	10	14	12	3	1	2	3	6	11
5	KT.SERANG	14	2	1	1	-	2	2	-	1	4	-	-	1
6	KT.TANGERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KT.CILEGON	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KT TANGSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		449	41	29	35	68	52	29	8	6	13	21	69	78

AC. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUBSEKTOR PERKEBUNAN RAKYAT MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	231	14	22	27	47	21	4	2	1	3	17	31	42
2	LEBAK	160	13	3	4	19	23	10	1	-	1	4	43	39
3	TANGERANG	127	6	4	15	21	10	8	4	5	6	6	23	19
4	SERANG	143	28	14	7	15	22	19	4	1	3	4	9	17
5	KT.SERANG	23	3	2	1	-	3	4	1	1	6	-	-	2
6	KT.TANGERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KT.CILEGON	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	KT TANGSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		687	66	45	54	102	79	45	12	8	19	31	106	120

AD. ALOKASI KEBUTUHAN JENIS PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUBSEKTOR PETERNAKAN MENURUT SEBARAN BULAN TAHUN 2014

NO	KABUPATEN /KOTA	Jumlah Setahun	RENCANA KEBUTUHAN/BULAN (TON)											
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	PANDEGLANG	46	2	3	6	10	4	1	-	-	1	4	6	9
2	LEBAK	33	2	1	1	4	5	2	-	-	-	1	9	8
3	TANGERANG	26	1	1	3	4	2	2	1	1	1	1	5	4
4	SERANG	30	6	3	1	3	4	4	1	-	1	1	2	4
5	KT.SERANG	4	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
6	KT.TANGERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KT.CILEGON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	KT TANGSEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		139	12	8	11	21	16	10	2	1	4	7	22	25

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. S A M S I R, SH. M.Si
Pembina Utama Muda